

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT
BIRO UMUM
UNIT LAYANAN PENGADAAN**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

PENGUMUMAN SELEKSI DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: PENG-02/SET.M.EKON.ULP.POKJA/TA-IT.EITI/12/2018

Kelompok Kerja Pemilihan 2 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan tender dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa konsultansi perorangan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Nama paket pekerjaan | : | Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Informasi Teknologi dan Data pada Sekretariat EITI Indonesia Tahun Anggaran 2019 |
| Lingkup pekerjaan | : | Jasa Konsultansi |
| Nilai total HPS | : | Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) |
| Sumber pendanaan | : | APBN Tahun Anggaran 2019 |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 16 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 (11,5 Bulan Kalender) |

2. Persyaratan Peserta

- 1) Kandidat memiliki gelar sarjana di bidang Sistem Informasi / Teknologi dengan pengalaman kerja minimal lima tahun yang relevan dengan teknologi informasi dan pengelolaan informasi data. Tingkat master lebih diutamakan;
- 2) Harus terbiasa dengan query SQL dan model data relasional;
- 3) Harus menunjukkan pengalaman dalam menginstal, mengkonfigurasi, mengelola dan memelihara sistem database, dengan keahlian yang telah terbukti di SQL dan sistem manajemen basis data populer seperti namun tidak terbatas pada MySQL atau PostgreSQL;
- 4) Harus menunjukkan pengalaman dalam mengelola Content Management Systems (CMS);
- 5) Pengetahuan yang baik tentang industri ekstraktif, kebijakan data terbuka dan inisiatif transparansi lainnya khususnya di Indonesia akan menguntungkan, namun tidak diperlukan;
- 6) Highly self-motivated and believe in the mission of EITI Indonesia;
- 7) Memiliki Motivasi yang besar dan percaya pada misi EITI Indonesia;
- 8) Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan;
- 9) Mampu bekerja individu maupun dalam tim;
- 10) Memiliki NPWP sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, serta memiliki bukti pembayaran pajak atas penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.;
- 11) Memiliki bukti pembayaran pajak penghasilan pada institusi pemberi kerja sebelumnya 1 tahun terakhir;
- 12) Tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).

3. Pendaftaran dan Pengambilan (*download*) Dokumen Pengadaan:

Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengambil Dokumen Pengadaan dengan mengunduh melalui aplikasi SPSE (www.lpse.lkpp.go.id).

4. Penandatanganan Kontrak:

Penandatanganan kontrak akan dilakukan apabila DIPA/POK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 17 Desember 2018

Pokja Pemilihan 2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian